



PELAKSANAAN KEBIJAKAN TARIF TRANSPORTASI OJEK ONLINE

**BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR KP 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN
DENGAN APLIKASI**

DI KOTAMADYA BUKITTINGGI

*Diajukan Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

BRAMA YUDHA ANDIKA

NIM : 11527103139

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Laporan akhir ini dengan judul *PELAKSANAAN KEBIJAKAN TARIF TRANSPORTASI OJEK ONLINE BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI DI KOTAMADYA BUKITTINGGI*, yang ditulis oleh:

Nama : **BRAMA YUDHA ANDIKA**

NIM : 11527103139

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2021 M

Dosen Pembimbing

NUR HIDAYAT, SH., MH

NIK. 130217038



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, "Pelaksanaan Kebijakan Tarif Transportasi Ojek Online Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Di Kotamadya Bukittinggi" yang ditulis oleh :

Nama : Brama Yudha Andika
NIM : 11527103139
Program Studi: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 19 April 2021
Waktu : 08:30
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Syahpawi, M, Sh

Sekretaris

Ilham Akbar, SH. MH

Penguji 1

Dr. Muhammad Darwis, SH. MH

Penguji 2

Dr. H. Abu Samah, MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

iteamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Brama Yudha Andika (2021) : “Pelaksanaan Kebijakan Tarif Transportasi Ojek Online Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Di Kotamadya Bukittinggi”

Pelaksanaan kebijakan tarif transportasi ojek *online* oleh Dinas Perhubungan berdasarkan pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan aplikasi di Kota Bukittinggi terdapat beberapa masalah dan pelanggaran tarif yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga tidak terlaksana pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tarif transportasi ojek *online* (Gojek).

Tujuan dari penelitian ini mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana kepastian hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*yuridis sosiologis*), yang memfokuskan pada data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Teknik pengambilan data *purposive sampling* dan dengan analisis kualitatif serta penarikan kesimpulan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terhadap pelaksanaan tarif ojek *online* pemerintah daerah sedang mengoptimalkan adanya peraturan daerah tentang ojek *online* ini. Uji coba yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengawasan pelaksanaan tarif di Kota Bukittinggi masih dalam pengembangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tarif sekarang ini Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat telah menegaskan Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran tarif ada 2 macam yaitu dengan perlindungan hukum dalam bentuk mencegah (*preventif*) dan perlindungan hukum penyelesaian (*represif*), dan pemberlakuan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terhadap pelanggaran pelaksanaan tarif Gojek yaitu sanksi paksaan pemerintah melalui surat resmi dan sanksi denda administratif.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Kebijakan Dinas Perhubungan, Sanksi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah *Subhanallahuwata'ala* Dzat Yang Maha Agung atas segala anugrah dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tarif Transportasi Ojek Online Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Kp 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Di Kotamadya Bukittinggi”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras para pihak dan arahan dosen pembimbing. Akhirnya, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah *Subhanallahuwata'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Ayahanda Tercinta Joelly Wakidi (Alm), Ibunda Tercinta Yezie Fauzia, Ayahanda Okta Busmadi dan Kakak Ayu Martazia, S.Tr.,Keb., yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan semangat, motivasi, hingga akhirnya penulis berhasil menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag., selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.Drs. Heri Sunandar, MCL., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, M.A., selaku Wakil Dekan III;
5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H., selaku Ketua jurusan Ilmu Hukum;
6. Bapak Nur Hidayat, S.H.,M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis;
7. Ibu Dra. Murny, M.Pd., dan Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis;

9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala dukungan dan bantuan yang telah penulis terima. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Maret 2021

Penulis,

BRAMA YUDHA ANDIKA
NIM. 11527103139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	15
A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi	15
1. Letak dan Geografis	15
2. Kependudukan.....	19
3. Keadaan Ekonomi Masyarakat.....	20
4. Agama dan Kepercayaan.....	22
5. Suku Budaya	22
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.....	23
1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi	23
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.....	24
3. Tujuan dan Sasaran	25
4. Fungsi Unit.....	25
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pemegang Jabatan Bidang Angkutan ...	25
6. Struktur Organisasi.....	26



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Gambaran Umum Gojek Kota Bukittinggi	27
1. Awal Berdiri Gojek di Kota Bukittinggi	27
2. Jenis-Jenis Layanan Gojek di Kota Bukittinggi	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Sistem Hukum Indonesia	29
1. Pengertian Sistem Hukum	29
2. Sistem Hukum Indonesia	30
3. Konsep Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	34
B. Hukum Administrasi Negara.....	42
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	42
2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.....	44
3. Peraturan Kebijakan	47
4. Kedudukan Peraturan Kebijakan Terhadap Peraturan Hukum	52
5. Keputusan-Keputusan Yang Bersifat Mengatur	54
6. Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara.....	55
7. Sanksi-Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara	59
8. Asas-Asas Umum Pemerintahan Daerah Yang Baik	64
C. Hukum Perhubungan Transportasi	65
1. Pengertian Hukum Perhubungan dan Transportasi	65
2. Dasar Hukum Perhubungan Transportasi	67
3. Transportasi <i>Online</i> Di Indonesia	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tarif Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.....	70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Perlindungan Hukum Dan Sanksi Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Pelaksanaan Tarif Gojek Di Kota Bukittinggi	76
--	----

BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Populasi dan Sampel	10
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Bukittinggi Per Kecamatan	18
Tabel 2.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi	19
Tabel 2.3	Agama dan Kepercayaan Masyarakat Kota Bukittinggi	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kota Bukittinggi.....	15
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi	26





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Angkutan merupakan perpindahan orang serta / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”.¹ Undang-Undang ini bertujuan supaya pelayanan lalu lintas serta angkutan jalan aman, selamat, lancar, tertib, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Transportasi adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi transportasi berarti suatu proses, yaitu proses pemindahan, proses pergerakan, proses mengangkut, serta mengalihkan dimana proses ini tidak dapat dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.²

Hukum perhubungan transportasi bersumber pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam

¹ Pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang* Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² Andriansyah dikutip dari Nasution (2008), “*Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*”, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Trayek, peraturan ini sebagai pedoman perencanaan, penyelenggaraan serta pengawasan dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor.³

Transportasi kebutuhan yang sangat berbanding lurus dengan pergerakan publik, dikarenakan memberikan kemudahan dalam akses dengan cepat, aman, murah serta nyaman. Kemudahan dalam transportasi ini tidak diiringi dengan penyediaan transportasi yang layak serta memadai, sehingga tidak mengherankan muncul inovasi teknologi informasi dalam transportasi semacam Gojek, Grab serta Anterin yang sering disebut dengan transportasi *online*.

Transportasi *online* merupakan pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap aktivitas transaksi, mulai dari pemesanan, pemantauan jalan, pembayaran serta evaluasi terhadap pelayanan jasa itu sendiri.⁴ Transportasi *online* adalah transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna serta pengemudi yang sangat memudahkan dalam pemesanan, serta tarif perjalanan telah langsung dapat dilihat pada aplikasi.⁵ Sebagian orang transportasi *online* merupakan solusi, tetapi disisi lain merupakan permasalahan bagi orang-orang yang masih menggunakan jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi. Banyaknya orang yang masih bergantung dengan transportasi konvensional, tetapi nampaknya tidak diimbangi dengan penyediaan transportasi konvensional yang mencukupi terutama ditinjau dari kapasitas angkut

³ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

⁴ Pratama, Suradi dan Aminah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*", Diponegoro Law Journal, (Semarang: 2016), Vol.5, No.3, h. 2-3.

⁵ Ibrahim Rambe, Skripsi: *Dampak Keberadaan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Tukang Becak Bermotor*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tarif. Terlebih dengan berbagai permasalahan yang muncul di perkotaan ialah kemacetan lalu lintas, sedikit pelayanan serta keadaan transportasi konvensional yang membuat resah warga.⁶

Munculnya inovasi transportasi *online* membuat warga banyak yang beralih dari pengguna transportasi konvensional ke transportasi *online* yang sangat dipengaruhi oleh kemudahan serta biaya tarif yang ditetapkan sangat murah dibanding dengan transportasi konvensional. Dari sebagian aspek kemudahan serta bayaran tarif yang murah ini menjadikan transportasi *online* tumbuh sangat cepat di tengah warga.

Kota Bukittinggi merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 ini mengatur serta mengurus urusan yakni: pekerjaan umum, kesehatan, kehewan, pertanian, perikanan, perhubungan darat, sosial, serta perindustrian kecil.⁷ Kota Bukittinggi termasuk Kota dengan transportasi *online* tumbuh sangat cepat, sekian banyak aspek yang mempengaruhi antara lain murah, cepat serta nyaman. Sejak ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2019 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, muncul permasalahan berkaitan dengan tarif.⁸

⁶ Tumuwe. Damis. Mulianti, “Pengguna Ojek Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado”, Holistik, (Manado: Januari-Juni 2018), Vol. IX, No. 21A, h. 2.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956.

⁸ Benny, Gojek, Wawancara, Bukittinggi, 13 Oktober 2019, Pukul 17:15 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, besaran bayaran jasa zona I sebagai berikut: biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850/ kilometer, biaya batas atas sebesar Rp 2.300/ kilometer serta biaya jasa minimum dengan rentang biaya jasa antara Rp 7.000 hingga dengan Rp 10.000. Permasalahan biaya tarif jasa batas atas yang diterapkan oleh pihak Gojek sebesar Rp 2.643/ kilometer, tarif yang diterapkan tidak sesuai dengan pedoman perhitungan biaya jasa dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 Lampiran II Zona 1 pada bagian b dengan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.300/ kilometer.⁹

Sebagai peranan pemerintah yang bertanggung jawab dalam transportasi, Dinas Perhubungan mesti melindungi kelompok masyarakat dari pelanggaran serta invasi yang dilakukan kelompok masyarakat yang lain; melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan serta dominasi yang dilakukan anggota lain dalam masyarakat; membentuk serta memelihara institusi publik supaya memberi manfaat yang besar dan kesempatan kerja untuk masyarakat; serta mengelola biaya yang dibutuhkan untuk mendukung peraturan-peraturan.¹⁰

Dinas Perhubungan dalam menindaklanjuti permasalahan pelanggaran tarif mesti adanya pengawasan serta sanksi yang ditetapkan dengan peraturan tarif yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019. Sesuai ketentuan pasal 11 Ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

⁹ Arya Herjon, Driver Gojek, Wawancara, Bukittinggi, 16 Oktober 2019, Pukul 19:05 Wib

¹⁰ Rudy Badrudin, "*Ekonomika Otonomi Daerah*", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat,¹¹ sehingga pihak Gojek mesti mengikuti peraturan pedoman perhitungan biaya jasa pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi bersumber pada yang sudah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Tujuan dalam meneliti masalah ini untuk tercapainya pengawasan dan pelaksanaan tarif Gojek sebagai transportasi ojek *online* oleh Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini untuk tercapainya pengawasan dengan prinsip efisiensi, keadilan, berkelanjutan serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum ini berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kebijakan Tarif Transportasi Ojek Online Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Di Kotamadya Bukittinggi”**

¹¹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat (5).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan dan mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, mendalam dan terarah tentang permasalahan yang diteliti, adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Pelaksanaan Kebijakan Tarif Transportasi Ojek *Online* Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terhadap pengawasan pelaksanaan tarif berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan sanksi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran pelaksanaan tarif Gojek di Kota Bukittinggi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data yang akurat dan memberikan manfaat.

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terhadap pengawasan pelaksanaan tarif berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan sanksi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran pelaksanaan tarif Gojek di Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan untuk manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Pelaksanaan Aturan Transportasi Ojek *Online* Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya dalam konsentrasi Hukum Tata Negara.
- d. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah hukum sosiologis (*Yuridis Sosiologis*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui *Observasi* (Pengamatan), wawancara.

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

¹² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria karena ada permasalahan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang masalah.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah staf Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, *driver* ojek online (Gojek), kiranya dapat membantu memudahkan peneliti dalam menemukan jawaban dari permasalahan dalam berbagai sudut pandang.

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terhadap tarif transportasi ojek online.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan Driver Gojek.

Sedangkan sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan objek penelitian, biasa disebut dengan teknik sampling.¹³ Dalam penelitian ini teknik sampling yang

¹³ Suratmo, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 88.

digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel tertuju kepada orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang penulis inginkan.

Untuk lebih jelasnya metode ini adalah pengambilan responden dengan sengaja menentukan sendiri yang dianggap tahu. Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Bidang Angkutan	1	1	100%
2	Staf Dinas Perhubungan	11	3	27%
4	Staf Sarana dan Prasarana	3	3	100%
5	Driver Gojek	100	10	10%
	Jumlah	115	17	14%

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

- Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁴ Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, observasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁴ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹⁵ Serta dokumen-dokumen profil Kota Bukittinggi dan *Beschikking*.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authority*).¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Dilakukan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁷ Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan

¹⁵ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Ibid.*, h. 47.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Ibid.*, h. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum, skripsi, jurnal hukum yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.

3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- Observasi atau pengamatan, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan data secara nyata dan jelas tentang yang diteliti.
- Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada staf Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, *driver* dan pengguna Gojek.
- Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁹

7. Metode penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka penulis menjelaskan data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan penelitian dan dijadikan suatu kesimpulan.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Ibid.*, h. 106.

¹⁹ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 133.

8. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif, merupakan tata cara untuk menghasilkan penelitian deskriptif kualitatif, dengan cara menganalisis dan mengklasifikasi data berdasarkan kategori dan persamaan jenis data tersebut. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari bersifat khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang Kota Bukittinggi dari segi letak geografis, kependudukan, keadaan ekonomi dan suku budaya, gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi serta sistematika struktur keorganisasian Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

BAB III : TINJAUAN TEORETIS

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan teori hukum kebijakan publik, tarif transportasi ojek *online*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang :

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terhadap pengawasan pelaksanaan tarif berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.
2. Perlindungan hukum dan sanksi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran pelaksanaan tarif Gojek di Kota Bukittinggi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi

1. Letak dan Geografis

Kota Bukittinggi terletak pada posisi 100°20'-100°25'-Bujur Timur dan 00°16'-00°16' Lintang Selatan dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,239 kilometer², yang merupakan 0,06 persen luas Provinsi Sumatera Barat.²⁰

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kota Bukittinggi



Sumber : Profil Wilayah Kota Bukittinggi

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Kota Bukittinggi Dalam Angka*, (2019), h. 5.

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu; Kabupaten Agam.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.

Luas wilayah Kota Bukittinggi saat ini 25,239 kilometer², 82,8% telah diperuntukan menjadi lahan budidaya, sedangkan sisanya merupakan kawasan lindung. Kota Bukittinggi saat ini terdiri atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan yang terdiri dari²¹ :

- a. Kecamatan Guguk Panjang

Kecamatan Guguk Panjang memiliki luas wilayah 6,831 kilometer² atau 27,07% dari luas wilayah Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 43.836 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Guguk Panjang adalah 6.417 jiwa/kilometer². Kecamatan guguk Panjang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Tarok Dipo.
- 2) Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang.

²¹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bukittinggi*, (2019), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kelurahan Pakan Kurai
- 4) Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
- 5) Kelurahan Benteng Pasar Atas
- 6) Kelurahan Kayu Kubu
- 7) Kelurahan Bukit Apit Puhun

b. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan (MKS)

Kecamatan Mandiingin Koto Selayan memiliki luas wilayah 12.185 kilometer² atau 48,28% dari luas wilayah Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 52.464 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 4.316 jiwa/kilometer². Kecamatan Mandiingin Koto Selayan terdiri dari 9 Kelurahan yaitu²² :

- 1) Kelurahan Campago Guguk Bulek
- 2) Kelurahan Campago Ipuh
- 3) Kelurahan Puhun Tembok
- 4) Kelurahan Kubu Gulai Bancah
- 5) Kelurahan Puhun Pintu Kabun
- 6) Kelurahan Pulai Anak Air
- 7) Kelurahan Koto Selayan
- 8) Kelurahan Garegeh
- 9) Kelurahan Manggis Ganting

²² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Ibid.*, h. 14.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh memiliki luas wilayah 6,252 kilometer² atau 24,778% dari luas wilayah Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 26.996 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 4.318 jiwa/kilometer². Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan yaitu²³ :

- 1) Kelurahan Aur Kuning
- 2) Kelurahan Birugo
- 3) Kelurahan Belakang Balok
- 4) Kelurahan Sapiran
- 5) Kelurahan Kubu Tanjung
- 6) Kelurahan Pakan Labuah
- 7) Kelurahan Parit Antang
- 8) Kelurahan Ladang Cakiah

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Bukittinggi Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
1	Guguk Panjang	683,1	27,07
2	Mandiingin Koto Selayan	1,215,60	48,28
3	Aur Birugo Tigo Baleh	625,2	24,77
Jumlah		2,523,90	100

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2019

Kota Bukittinggi memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, diantaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiingin, Bukit Campago, Bukit

²³ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Ibid.*, h. 14-15.

Paninjauan dan sebagainya. Selain itu terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.²⁴

2. Kependudukan

Kota Bukittinggi mempunyai penduduk menurut data terakhir 98.505 orang dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,04 % dan kepadatan rata-rata 3.905 jiwa per-kilometer. Dengan semangat membangun masyarakat Bukittinggi yang cukup menggembirakan, terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan hidup yang umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai, petani, pengusaha industri kecil dan kerajinan serta jasa-jasa lainnya.

Sebagian besar penduduk Kota Bukittinggi beragama Islam sekitar 97,89 % dan selebihnya beragama Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Penduduk terpadat berdomisili di kecamatan Guguk Panjang, karena pusat perdagangan dan kegiatan lain sebagian besar berada di kecamatan tersebut dengan kepadatan rata-rata 5.531 jiwa/kilometer.

²⁴ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Ibid.*, h. 15.

Tabel 2.2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Luas Wilayah (kilometer ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per kilometer ²)
1	2	3	4	5
1	Guguk Panjang	6,831,0	43.836	6.417
2	Mandiingin Koto Selayan	12,156,0	52.464	4.316
3	Aur Birugo Tigo Baleh	6,252,0	26.996	4.318
JUMLAH		25,239,0	123.296	15.051

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Bukittinggi Tahun 2019

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Sebagai kawasan yang terletak di Pegunungan Bukit Barisan, di tepi Ngarai Sianok, di kelilingi dua gunung Singgalang dan Marapi serta berada di ketinggian 909 hingga 941 mdpl, wilayah Bukittinggi memiliki hawa yang cukup sejuk serta terkesan asri dan hijau. Bukittinggi, Kota kecil di dataran tinggi Sumatera ini memiliki banyak objek wisata yang bisa dikunjungi diantaranya Jam Gadang, Taman Panorama Ngarai Sianok, Lubang Jepang, Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta dan tentunya wisata kuliner seperti Nasi Kapau pasar Lereng, cindua langkok, pisang kapik dan banyak lagi. Banyaknya yang ingin berkunjung ke Bukittinggi sehingga pemerintah Kota Bukittinggi menjadikan perekonomian masyarakat bersumber dari sektor pariwisata dan berdagang serta jasa.

Perkembangan pasar loih galuang yang sekarang disebut Pasar ateh, membuat pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1900 mengembangkan sebuah *roads* ke arah timur, tepatnya pada kawasan pinggang bukit yang berdekatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan selokan yang mengalir di kaki bukit. Karena lokasi pasar tersebut berada di kemiringan, masyarakat setempat menyebutnya dengan Pasar teleng (miring) atau Pasar lereng. Perkembangan berikutnya di sekitar kawasan tersebut muncul lagi beberapa pasar, di antaranya Pasar bawah dan Pasar banto. Pasar-pasar tradisional di sekitar kawasan Jam Gadang ini, kemudian berkembang menjadi tempat penjualan hasil kerajinan tangan dan cenderamata khas Minangkabau (Bukittinggi). Dalam penataan pasar, pemerintah Hindia-Belanda juga menghubungkan setiap pasar tersebut dengan janjang (anak tangga), dan di antara anak tangga yang terkenal adalah Janjang 40, yang selanjutnya jenjang ini menjadi ikon pariwisata Kota Bukittinggi.²⁵

Untuk mengurangi penumpukan pada satu kawasan, pemerintah Kota Bukittinggi kemudian mengembangkan kawasan perkotaan ke arah timur dengan membangun Pasar aur kuning, yang saat ini merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Disebabkan luas wilayah yang kecil, sektor perdagangan merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan penduduknya.

Selain itu pemerintah Kota Bukittinggi juga mengeluarkan beberapa program dalam mengentaskan kemiskinan, di antaranya pelatihan keterampilan membordir dan pelatihan pembuatan kebaya, serta penumbuhan wirausaha baru. Bordir asli Bukittinggi biasanya menggunakan teknik kerancang langsung yang tergolong rumit dan memakan waktu dalam pembuatannya. Ini berbeda dengan

²⁵ *Ibid.*, h. 16.

barang hasil buatan Tasikilometeralaya, Jawa Barat yang menggunakan teknik kerancang solder.

4. Agama dan Kepercayaan

Tabel 2.3
Agama dan Kepercayaan Masyarakat Kota Bukittinggi

Agama dan Kepercayaan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	JML	%	JML	%	JML	%
Islam	60.131	97,3	59.935	97,46	120,066	97,38
Kristen	1.029	1,66	925	1,5	1,954	1,58
Katolik	546	0,88	554	0,9	1.100	0,89
Hindu	2	0	3	0	5	0
Budha	93	0	77	0,13	170	0,14
Konghucu	0	0	0	0	0	0
Kepercayaan	1	0	0	0	1	0
Jumlah	61,802	100	61.494	100	123.239	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Kota Bukittinggi Tahun 2019

Dari tabel yang disajikan di atas, bahwa di setiap kecamatan di Kota Bukittinggi jumlah penduduk beragama Islam lebih banyak dibanding agama lainnya. Persentase jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 97,38% dari total penduduk Kota Bukittinggi.

5. Suku Budaya

Sebagaimana diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ribuan kepulauan (*archipelago*) dengan bermacam suku bangsa yang memiliki adat istiadat serta agama yang berlainan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang hidup tumbuh dan berkembang di tengah pergaulan dunia.²⁶

²⁶ Edison Piliang, "Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Di Minangkabau", (Sumatera Barat, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014), h. 1.

Salah satu kebudayaan yang terdapat di Kota Bukittinggi merupakan Adat Alam Minangkabau, yang dianut serta dikembangkan oleh masyarakat Bukittinggi semenjak dahulu hingga sekarang. Ajaran Adat Alam Minangkabau termasuk di antara ajaran adat yang memiliki keistimewaan tertentu, paling utama dari garis keturunan yang bersifat *matrilineal* (garis keturunan ibu) dengan sistem kekerabatan *Matriarchat*, sistem kekerabatan Minang ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Bukittinggi hingga saat ini.²⁷

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas perhubungan Kota Bukittinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan darat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016, tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.²⁸

²⁷ *Ibid.*, h. 1-2.

²⁸ Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tentunya Dinas Perhubungan memiliki keterkaitan erat dalam mendukung program Pemerintah Daerah. Adapun Visi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam RPJMD 2016-2021 adalah²⁹ :

Visi : Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya. Misi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam RPJMD 2016-2021 yang ingin dicapai berdasarkan kepada nilai-nilai agama dan budaya yaitu :

- a. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat);
- b. Meningkatkan kinerja pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan;
- c. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana Kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan;
- d. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial.

Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan adalah : "Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Kota di bidang Perhubungan.

“Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Bukittinggi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang secara umum mendukung misi

²⁹ Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Walikota ketiga yaitu “meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan”, sedangkan tujuan tingkat Kota yaitu tujuan empat Terwujudnya pelayanan dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu.

3. Tujuan dan Sasaran

Optimalisasi sistem angkutan yang berkualitas dan ramah lingkungan dan peningkatan keselamatan dan kelancaran berlalu lintas di jalan. Sedangkan untuk sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sesuai dengan visi dan misi adalah :

- a. Meningkatnya kelaikan operasional kendaraan angkutan.
- b. Terlayannya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan yang berkualitas.
- c. Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas.
- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Fungsi Unit

Fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
- b. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Kota di bidang Perhubungan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pemegang Jabatan Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dalam melaksanakan tugas, bidang angkutan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Penyusunan rencana kerja bidang angkutan mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang angkutan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang angkutan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang angkutan;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang angkutan;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang angkutan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Struktur Organisasi

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Gambaran Umum Gojek Kota Bukittinggi

1. Awal Berdiri Gojek di Kota Bukittinggi

Awal berdirinya gojek di Kota Bukittinggi pada bulan Agustus 2017 terjadi penolakan dari para transportasi lokal. Alasan gojek berdiri di Kota Bukittinggi untuk memberdayakan sektor informal melalui pelayanan *on-demand* berbasis terdepan di Indonesia hadir membantu para pekerja sektor informal dan pelaku UMKM di Sumatera Barat khususnya di Kota Bukittinggi meningkatkan pendapatannya melalui teknologi. Gojek sendiri awalnya membuka lapangan pekerjaan dan menambah pemasukan bagi *driver* gojek, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Universitas Indonesia, bahwa 77 persen *driver* gojek menerima pemasukan di atas rata-rata upah minimum, rata-rata upah minimum nasional saat itu tercatat di angka Rp. 1.099.000,- (satu juta sembilan puluh sembilan ribu).³⁰

2. Jenis-Jenis Layanan Gojek di Kota Bukittinggi

Gojek memberikan penawaran dalam pelayanan yang menarik bagi pelanggan, yaitu :

- a. *Go-Ride* : sebuah layanan yang menggunakan sepeda motor, *driver* akan siap menjemput dimanapun dan mengantar sampai ke tempat tujuan.
- b. *Go-Car* : sebuah layanan transportasi menggunakan mobil yang akan menjemput dan mengantar penumpang sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan, dengan maksimal penumpang 6 orang.

³⁰ Lihat <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/10/ougpf335-ditentang-di-bukittinggi-gojek-kami-jalan-terus>, diakses pada tanggal 01 Desember 2020, pukul 16:53 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Go-Food* : sebuah layanan pesan makanan ke resto yang sudah bekerjasama dengan perusahaan gojek.
- d. *Go-Shop* : layanan untuk membelikan barang atau apapun yang belum terdaftar dan bekerja sama dengan gojek.
- e. *Go-Send* : layanan gojek untuk membantu mengambil dan mengantarkan dokumen atau paket jarak dekat dengan cepat.
- f. *Go-Pulsa* : layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk melakukan pembelian pulsa melalui aplikasi.³¹

³¹ Lihat <https://gojekblog.com/layanan-aplikasi-gojek-customer-terbaru-2019/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2020, pukul 17:10 Wib.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum Indonesia

1. Pengertian Sistem Hukum

Sistem hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah sistem (misalnya sistem Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi) yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* sebagai suatu Negara Hukum. Namun, bagaimana penjabaran ide Negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif atau menyeluruh, yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat terbagi. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum.

Sebagai kesatuan sistem hukum, terdapat unsur kelembagaan, unsur aturan hukum dan unsur perilaku badan hukum, yang mengemban hak dan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga unsur sistem hukum tersebut antara lain kegiatan legislatif, penegakan hukum atau kegiatan penerapan, dan kegiatan peradilan yang melanggar hukum. Misalnya, karena negara kita telah mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental, kita cenderung lebih fokus pada kegiatan pembuatan hukum oleh legislatif dan lebih sedikit pada kegiatan penegakan hukum. Tidak adil untuk memaksakan norma hukum kepada orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang tidak mengerti, tidak ikut serta dan tidak mengerti aturan dan ketentuan yang berlaku bagi mereka. Oleh karena itu, selain keberadaan antara kegiatan legislatif dan kegiatan penegakan hukum, ada juga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu koreksi hukum yang selama ini sering diabaikan dan dianggap tidak penting selama ini.³²

Mengenai kaitannya dengan pembangunan hukum, Pancasila dapat disebut sebagai kerangka sistem hukum, yaitu sistem unik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Hukum adalah cermin serta pelayan masyarakat, oleh karena itu sistem harus sesuai dengan masyarakat, masyarakat yang berbeda tentu dilayani oleh sistem hukum yang berbeda-beda. Sistem hukum Pancasila berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental yang hanya menekankan pada *Legisme, Civil Law*, administrasi, kepastian hukum serta hukum-hukum tertulis yang negara hukumnya disebut *Rechtsstaat*. Sistem hukum Indonesia juga berbeda dengan sistem hukum *Anglo Saxon* yang hanya mengedepankan peran keadilan *Common Law* yang disebut *The Rule Of Law*.³³

2. Sistem Hukum Indonesia

Indonesia sendiri telah menundukan dirinya untuk menganut sistem hukum *Civil Law*, sehingga prinsip utamanya adalah mempositifkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat

³² Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h. 306-309.

³³ Moh. Mahfud MD, "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan Indonesia.

Pengertian hukum positif diperluas, termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu, bukan saja berlaku sekarang. Perluasan ini timbul karena dalam definisi keilmuan mengenai hukum positif dimasukkan unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Hukum yang pernah berlaku, adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu sehingga termasuk pengertian hukum positif. Memasukkan hukum yang pernah berlaku sebagai hukum dengan pengertian keilmuan yang membedakan antara *ius constituutum* dan *ius constituendum*. *Ius constituendum* diartikan sebagai hukum yang diinginkan yaitu hukum yang didapat dalam rumusan-rumusan hukum tetapi belum berlaku.

Rancangan peraturan perundang-undangan (RUU, RPP, Rancangan Peraturan daerah, dan lain-lain rancangan peraturan) adalah contoh-contoh dari *ius constituendum* peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tetapi belum berlaku. *Ius constitutum* adalah hukum yang berlaku atau disebut hukum positif.³⁴ Unsur-unsur hukum positif, yaitu :

- a. Hukum positif mengikat secara umum dan khusus, mengikat secara umum merupakan aturan hukum yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-undangan yang dijadikan dan diakui sebagai hukum positif. Mengikat secara khusus adalah hukum yang mengikat subjek dan objek tertentu, di dalam ilmu hukum administrasi negara dinamakan *beschikking*.

³⁴ Bagir Manan, "Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)", (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Hukum positif ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan, manusia hidup dan diatur, serta tunduk pada berbagai aturan. Selain aturan umum atau khusus yang telah disebutkan diatas, manusia juga diatur dan tunduk pada aturan adat-istiadat (hukum kebiasaan), hukum agama (sepanjang belum menjadi hukum positif), hukum moral. Hukum kebiasaan, hukum agama, hukum moral mempunyai daya ikat yang kuat bagi seseorang atau suatu kelompok tertentu. Ketaatan-ketaatan terhadap hukum kebiasaan, hukum agama, atau hukum moral tergantung pada sikap orang perorangan dan sikap kelompok masyarakat yang bersangkutan. Negara dalam hal ini pemerintah dan pengadilan tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mempertahankan atau menegakkan hukum tersebut. Tetapi tidak berarti hukum kebiasaan, hukum agama, atau hukum moral tidak berpeluang mempunyai kekuatan sebagai hukum positif.³⁵

c. Hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia, hukum positif adalah aturan hukum yang bersifat nasional, bahkan mungkin lokal. Hukum positif lokal dapat dibedakan antara hukum positif yang lahir atau dibuat dan berlaku dalam lingkungan pemerintahan otonomi berupa Peraturan Daerah, atau keputusan-keputusan lainnya. Hukum positif lokal ini termasuk juga peraturan hukum yang dibuat pada tingkat nasional tetapi hanya berlaku untuk daerah atau wilayah tertentu.³⁶

Sistem Hukum ini mengikuti filsafat *positivisme* hukum yang menyatakan

bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau

³⁵ Bagir Manan, *Ibid.*, h. 5.

³⁶ Bagir Manan, *Ibid.*, h. 10-11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kemanfaatan, karena filsafat *positivisme* mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan beragumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Dengan demikian, dalam kultur sistem hukum, hukum identik dengan Undang-Undang, sumber hukum adalah Undang-Undang, nilai-nilai bersumber dari Undang-Undang, oleh karena itu sistem tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Sistem hukum positif berkembang di negara-negara Eropa daratan yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi. Sistem hukum positif mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada Presiden sehingga Undang-Undang menjadi sumber hukum yang terutama serta hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan memutuskan perkara dan sistem peradilan bersifat *inkuisitorial*. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum positif adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk Undang-Undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan (*yurisprudensi*).³⁸

Sebenarnya hukum dibentuk atau dibuat dengan memperhatikan cita hukum bangsa dan negara Indonesia yang menjadi penentu arah kehidupan

³⁷ Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, “*Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding, (Jakarta Pusat: 2019), Vol.8, No.1, h. 41-42.

³⁸ Fajar Nurhardianto, “*Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*”, Jurnal Tapis, (2015), Vol.11, No.1, h. 36-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

sebagai rakyat yang teratur, bukan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan penguasa. Disinilah letak arti pentingnya fungsi sistem hukum yang memberikan nilai-nilai keadilan dalam proses pembentukan hukum. Fungsi sistem hukum adalah³⁹:

- a. Pertama, Memberi makna pada hukum;
- b. Kedua, Membatasi lingkup hukum positif yang dapat dibentuk;
- c. Ketiga, menetapkan ukuran untuk menilai adil tak adil nya suatu hukum positif.

Secara umum nilai-nilai dasar cita-cita hukum bangsa Indonesia dapat dirumuskan sebagai hukum nasional dibangun dengan mempertimbangkan kriteria rasional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etik dan moral untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Seluruh tumpah darah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di mana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.⁴⁰

3. Konsep Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Pancasila mengambil dari segi terbaik dari *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) serta *The Rule Of Law (Anglo Saxon)* yang di dalamnya bertemu suatu hubungan prismatic serta integratif prinsip kepastian hukum dan keadilan substansial. Dalam penegakan hukum, sistem hukum Pancasila menghendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum yang

³⁹ Riri Nazriyah, "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional", Jurnal Hukum, (2002), Vol.20, No.9, h. 139-140.

⁴⁰ Riri Nazriyah, *Ibid.*, h. 139.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

formal maupun kepastian bersumber pada peraturan hukum yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial.⁴¹

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam hal pelaksanaan serta penegakan hukum. Kepastian hukum yang menghendaki kalau hukum bisa berperan sebagai peraturan yang syarat hukum dapat dijadikan sebagai kepastian hukum dari aturan yang harus diikuti, tidak hanya bagaimana cara pelaksanaannya, tetapi juga bagaimana norma atau materi muatan dalam Undang-Undang tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan ibarat norma tertulis (Undang-Undang) yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Setiap produk dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan "Pancasila" dan "Hukum Pokok".⁴²

Salah satu ciri penting dari *Good Governance* adalah prinsip *The Rule Of Law* peran hukum sebagai mengatasi dalam semua persoalan kehidupan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa hukum bukanlah segala-galanya. Di samping norma hukum, masih memerlukan norma etika-moral bahkan norma agama untuk keperluan mengatur, mengendalikan dan mendorong dinamika kehidupan bersama. Mengenai prinsip *The Rule Of Law*, dapat dikatakan bahwa sebagai ide

⁴¹ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, h. 8.

⁴² Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial review*)", Jurnal Legislasi Indonesia, (Jakarta Selatan: 2016), Vol.13, No.02, h. 192.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diadopsikan di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Inilah yang disebut oleh *The founding fathers* dengan prinsip (*Rechtsstaat*). Pada awalnya, ide ini memang hanya dikaitkan dengan bangunan konseptual dari negara yang hendak didirikan, yaitu Republik Indonesia.

Kurang lebih sama dengan prinsip *good government*, belum dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang juga harus diterapkan di lingkungan pemerintah daerah. Sekarang, prinsip *The Rule Of Law* itu juga perlu diterapkan di lingkungan yang lebih luas dari hanya organisasi negara. Di manapun juga, yang harus dianggap sebagai pemimpin yang utama bukanlah orang, tetapi sistem aturan atau norma, yaitu *The Rule Of Law*. *The Rule Of Law* dalam arti bahwa suatu kepemimpinan dalam pemerintahan yang sebenarnya adalah terdapat pada hukum, bukan pada orangnya artinya, pemimpin suatu negara atau pemimpin suatu pemerintah daerah itu sendiri pada hakikatnya adalah hukum, bukan pribadi orang.

Asas legalitas merupakan salah satu dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum Islam “*ma kaana mu’adzibiina hatta nab’atsa rasuula*” (Kami tidak menjatuhkan siksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul), dalam hukum pidana “*nullum delictum sine praevia lege ponalli*” (tidak ada hukuman tanpa Undang-Undang). Kemudian asas legalitas ini digunakan dalam hukum administrasi negara dengan makna “*dat hat betstuur aan de wet is onderworpen*” (bahwa pemerintah tunduk kepada Undang-Undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang disebut dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” (prinsip keabsahan pemerintahan).⁴³

Asas Legalitas (*Due Procces of Law*) adalah segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Setiap tindakan atau perbuatan harus berdasarkan peraturan (*regels*). Untuk menjamin ruang gerak pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas, maka diimbangi dengan prinsip *Freies Ermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid regels* yang berlaku secara bebas yang dibebankan oleh peraturan yang sah.⁴⁴

Hukum dilihat sebagai satu kesatuan sistem aturan yang berpusat pada konstitusi. Oleh karena itu, sesuai prinsip supremasi hukum dan supremasi konstitusi, pemimpin sebenarnya dalam negara hukum adalah konstitusi, penerapan prinsip demikian dalam seluruh kegiatan bermasyarakat dan berbangsa dalam berorganisasi sebagai warga negara kita diatur dan terikat pada *Code Of Law*, yaitu kode hukum negara, tetapi pada saat yang sama sebagai warga atau anggota organisasi, perilaku berorganisasi kita diikat oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.⁴⁵

Dalam ranah sesuatu peraturan hukum, tercantum asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya, kalau asas hukum dapat dimaksud sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami sesuatu peraturan

⁴³ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 90-91.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, h. 128.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 297-302.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum dibutuhkan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Asas hukum mempunyai kandungan tuntutan etis sehingga bisa dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial serta pemikiran etis masyarakat.⁴⁶

Sejatinya terdapat banyak sekali asas yang jadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. Asas kepastian hukum buat dimengerti bagaimana korelasinya dengan penalaran positivisme hukum. Kepastian hukum adalah kebutuhan langsung masyarakat. Dalam ikatan dengan negara, kepastian hukum berarti tindakan negara bisa diperhitungkan karena diambil bersumber pada hukum yang berlaku umum. Kepastian hukum itu harus mempunyai bobot yang formal maupun yang material, sebab masyarakat pada umumnya mempunyai kepekaan terhadap ketidakadilan, sebagai konsekuensinya negara harus bertanggung jawab untuk mengurus tertib hukum, keandalan hukum (*legal reliability*) serta kesinambungan hukum (*legal continuity*). Sebagai bagian dari proses penegakan kepastian hukum harus bertumpu pada dua komponen yakni kepastian untuk masyarakat serta kepastian dalam pelaksanaan hukum oleh penegak hukum.⁴⁷

Kepastian hukum dalam konsep negara hukum masih butuh tanggapan sebagai kepastian orientasi, sehingga hukum-hukum yang dibuat mesti jelas serta tegas. Kepastian hukum yang dituangkan dalam teks-teks hukum tidak bakal dapat menyatukan pemikiran banyak orang terhadap rumusan dan prosedur hukum yang

⁴⁶ Mario Julyano. Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido (Diponegoro: 2019), Vol.1, No.1, h. 13.

⁴⁷ Muhammad Tahir Azhary, "Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam", (Jakarta: Kencana, 2015), h. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terdapat di dalam Undang-Undang, sebab kepastian hukum bukan semata-mata melakukan apa yang tertera dalam Undang-Undang. Makna legalitas dalam hubungan kepastian hukum hanya berkaitan dengan apa yang dinyatakan dalam hukum (Undang-Undang), sehingga gagasan kepastian hukum sebagaimana diartikan supaya kepastian hukum bisa dipastikan terselenggara hakikat perlakuan yang sama (*equality*) dalam konsep negara hukum.⁴⁸

Kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materil dan yang lain bersifat resmi. Aspek hukum material terikat erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum membatasi badan pemerintahan untuk menarik kembali sesuatu keputusan ataupun mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Sebaliknya kepastian hukum formal bahwa setiap keputusan yang memberatkan serta ketentuan yang terkait pada ketetapan yang memberatkan serta ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan mesti disusun dengan kata yang jelas. Kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki.⁴⁹

Berlakunya kepastian hukum bertujuan menjamin kalau hukum terwujud dalam masyarakat serta prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable* ataupun bisa disangka. Asas-asas yang terkait dengan kepastian hukum itu adalah⁵⁰ :

⁴⁸ E. Fernando M. Manullang, "*Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2017), h. 160.

⁴⁹ Fajlurrahman Jurdi, "*Hukum Tata Negara*", (Jakarta: Kencana, 2019), h. 65-66.

⁵⁰ Teuku Saiful Bahri Johan, "*Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 288-289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Asas legalitas, konstiusionalitas dan supremasi hukum;
- b. Asas Undang-Undang menetapkan bermacam perangkat peraturan-peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melaksanakan tindakan pemerintahan;
- c. Asas *non-retroaktif*, di mana Undang-Undang sebelum mengikat, Undang-Undang mesti diumumkan secara layak;
- d. Asas peradilan bebas, independen, imparsial, objektif, rasional, adil serta manusiawi;
- e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak permasalahan karena alasan Undang-Undang tidak ada ataupun tidak jelas;
- f. Hak asasi manusia mesti dirumuskan serta dipastikan perlindungannya dalam Undang-Undang.

Kepastian hukum materil menekankan pada kepastian perlindungan atas hak-hak masyarakat serta dipenuhinya harapan-harapan yang ditumbuhkan oleh pemerintah. Asas kepastian hukum menghendaki hak seseorang yang telah diperoleh bersumber pada sesuatu keputusan pemerintah, setiap keputusan yang dibuat pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali terdapat hal-hal penting yang dijadikan dasar penarikan kembali serta mesti dibuktikan melalui proses peradilan yang legal. Kepastian hukum formil menggambarkan ketetapan yang muatan materinya memberatkan ataupun menguntungkan pihak tertentu.⁵¹

Aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil ditengah sekian banyak dinamika serta konflik ditengah masyarakat. Aspek

⁵¹ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

legalitas ini menyangkut apa yang diujarkan dengan hukum positif adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan negara yang legal serta dalam pemberlakuannya bisa dipaksakan atas nama hukum. Bersumber pada kedua aspek tersebut, seringkali terjadi perbenturan di mana “terkadang hukum positif ternyata tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan serta kebalikannya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum”. Di tengah itu maka komprominya merupakan bagaimana supaya seluruh hukum positif yang ada selalu menggambarkan cerminan dari rasa keadilan itu sendiri”.⁵²

Kepastian hukum ketentuan ataupun ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang sanggup memberikan jaminan atas hak serta kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap serta tidak berubah-ubah dimana pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif, untuk mewujudkan “kepastian hukum” setidaknya haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu : substansi hukum, aparatur hukum, serta budaya hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti kalau seseorang akan dapat mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Konsep kepastian hukum adalah bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu membutuhkan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional ataupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara tidak

⁵² I Wayan Suandi, "Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Bali: 2017), Vol.1, No.1, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berubah-ubah serta konsekuensi oleh sumber daya manusia pendukungnya”. Kepastian hukum yang sesungguhnya merupakan apabila peraturan perundang-undangan bisa dijalankan sesuai dengan prinsip serta norma hukum. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum harus sejalan, tidak boleh cuma kepastian hukum tergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya merupakan apabila kepastian dalam *law in the books* tersebut bisa dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip serta norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.⁵³

B. Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi menitikberatkan pada aspek hukum pemerintahan, antara lain merupakan hukum mengenai kewenangan, organisasi publik, hukum mengenai kedudukan dan masyarakat, serta hukum mengenai perlindungan hukum untuk rakyat. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa Makna administrasi dalam Hukum Administrasi” Negara” tidak sama dengan makna administrasi dalam Ilmu Administrasi Negara. Hal itu dapat membingungkan mereka yang menekuni masing-masing ilmu tersebut secara sepihak. Oleh sebab itu disarankan supaya dalam menyebut sebutan Hukum Administrasi ”Negara” digunakan sebutan lain bagaikan alternatif. Sebutan Hukum Tata Pemerintahan merupakan salah satu alternatifnya Makna administrasi dalam Hukum Administrasi ”Negara” telah memiliki konotasi pemerintahan atau negara. Oleh

⁵³ Tony Prayogo, *Op.Cit*, h. 194-195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu dalam bidang hukum ini sebenarnya tidak butuh ditambah atribut "negara", sehingga cukup dengan sebutan Hukum Administrasi.⁵⁴

Hukum Administrasi Negara secara umum berupaya untuk memahami konsep tertentu. Kita dapat menetapkan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah Hukum Administrasi Negara, pertama-tama harus ditetapkan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum Administrasi Negara ataupun hukum tata pemerintahan pada dasarnya bisa dibedakan menurut tujuannya dari Hukum Tata Negara yang memuat peraturan-peraturan hukum dalam menentukan (tugas-tugas yang dipercayakan) kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan peran terhadap warga negara, serta peraturan-peraturan hukum yang mengendalikan tindakan-tindakan organ pemerintahan itu. Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan organisasi dan fungsionalisasi pemerintahan umum dalam hubungannya dengan masyarakat. Hukum Administrasi Negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum dan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Jadi

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, "Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Ilmu Hukum", Demokrasi, (2007), Vol.VI, No.1, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan dari definisi Hukum Administrasi Negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan-peraturan tersebut dibentuk untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara. Hukum Administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu⁵⁵ :

- a. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya;
- b. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Adapun ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara adalah bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara) baik di tingkat pusat maupun daerah, perhubungan kekuasaan antar lembaga negara (administrasi negara), dan antara lembaga negara dengan masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Oleh karena itu negara hanya sekedar penjaga dan pengatur lalu lintas kehidupan masyarakat agar tidak terjadi benturan-benturan, baik menyangkut kepentingan hak dan kewajiban, kebebasan

⁵⁵ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 32-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan kemerdekaan, dan atau benturan-benturan dalam kehidupan masyarakat lainnya.⁵⁶

Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan kekuasaan eksekutif, namun pengertian kekuasaan eksekutif ini tidak sama dengan apa yang dimaksudkan dalam konsep trias politika, yang menempatkan kekuasaan eksekutif hanya melaksanakan Undang-Undang. Walaupun secara umum tentang pemerintahan adalah selaku suatu aktivitas di luar perundangan serta peradilan, akan tetapi pada realitasnya pemerintah pula melaksanakan aksi hukum dalam bidang legislasi, misalnya dalam perihal pembuatan Undang-Undang organik serta pembuatan bermacam peraturan penerapan yang lain, serta pula berperan dalam bidang penyelesaian perselisihan, misalnya dalam penyelesaian hukum lewat upaya administrasi serta dalam perihal penegakan Hukum Administrasi Negara ataupun pada pelaksanaan sanksi-sanksi administrasi yang seluruhnya itu jadi objek kajian Hukum Administrasi Negara. HAN bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Meskipun demikian, sekadar untuk memberikan gambaran umum, bagian-bagian pokok dari Hukum Administrasi Negara khusus, yaitu hukum ketertiban dan keamanan umum (*recht openbare orde en veiligheid*), Hukum Administrasi Negara tentang tata ruang (*ruimtelijk bestuursrecht*), Hukum Administrasi Negara bidang ekonomi (*economisch bestuursrecht*), Hukum Administrasi Negara bidang sosial (*sociaal bestuursrecht*), Hukum Administrasi Negara bidang kebudayaan (*cultureel bestuursrecht*),

⁵⁶ Muhamad Rahkmat, "Hukum Administrasi Negara Indonesia", (Bandung: LoGoz Publishing, 2014), h. 22-23.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hukum Administrasi Negara bidang kesehatan (*medisch bestuursrecht*), Hukum Administrasi Negara bidang keuangan (*fiscaal bestuursrecht*) secara garis besar Hukum Administrasi Negara meliputi bidang pengaturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang menjadi objek kajian hukum administrasi negara ini demikian luas. Oleh karena itu, tidak mudah menentukan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Di samping itu, kesukaran menentukan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara ini disebabkan pula oleh beberapa faktor⁵⁷ :

- a. HAN berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak seluruhnya bisa ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, bersamaan dengan perkembangan kemasyarakatan yang membutuhkan pelayanan pemerintah serta tiap-tiap masyarakat di suatu wilayah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhan.
- b. pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, serta instrumen yuridis bidang administrasi yang lain tidak hanya terletak pada satu tangan ataupun lembaga.
- c. Hukum Administrasi Negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan serta kemasyarakatan, yang mengakibatkan penumbuhan bidang Hukum Administrasi Negara tertentu berjalan secara sektoral.

⁵⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 38-46.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Kebijakan

Peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) merupakan peraturan yang dibuat baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *Freies Ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Peraturan kebijakan hanya ada dalam administrasi negara, pada saat ini terdapat juga semacam peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh badan yang bukan administrasi negara seperti surat edaran Mahkamah Agung. Meskipun menyerupai tetapi surat edaran Mahkamah Agung tidak perlu di masukkan kedalam kategori peraturan kebijakan dikarenakan Mahkamah Agung tidak termasuk administrasi negara, wewenang Mahkamah Agung tidak didasarkan pada kebebasan bertindak tetapi atas petunjuk Undang-Undang, surat edaran berada dalam cakupan yang terbatas. Peraturan kebijakan atas dasar *Freies Ermessen* atau *beleidsvrijheid* adalah peraturan yang semata-mata berkaitan dengan *doelmatigheid* sehingga tidak terkait dengan unsur *rechtmatigheid*. Unsur *doelmatigheid* sebagai alas *Freies Ermessen* haruslah suatu tujuan atau manfaat yang dibenarkan hukum. Kebebasan bertindak adalah kebebasan dalam lingkup wewenang yang telah ditentukan berdasarkan hukum. Setiap tindakan administrasi negara di luar wewenang yang telah ditetapkan berdasarkan hukum, termasuk tindakan berdasarkan *Freies Ermessen* tindakan melampaui wewenang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*détournement de pouvoir*), bahkan dapat melawan hukum (*onrecht matigoverheids daad*), atau penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*).⁵⁸

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *Freies Ermessen*. *Freies Ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Meskipun pemberian *Freies Ermessen* kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, *Freies Ermessen* ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, mengemukakan unsur-unsur *Freies Ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut :

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas atau *Freies Ermessen*, namun dalam suatu negara hukum penggunaan *Freies Ermessen* ini harus dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Batas-atas dimaksudkan ketaatan-asas ketentuan perundang-undangan berdasarkan asas taat-asas, yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi Sedangkan batas bawah adalah peraturan yang dibuat atau sikap tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Dalam ilmu Hukum

⁵⁸ Bagir Manan, *Op.Cit.*, h. 15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Administrasi Negara, *Freies Ermessen* ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *Freies Ermessen* ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijakan.⁵⁹

Peraturan kebijakan peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan Undang-Undang formal baik langsung maupun tidak langsung, artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan Undang-Undang dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya. Peraturan kebijakan diartikan suatu keputusan, dengan isi aturan tertulis yang mengikat umum, yang memberikan aturan umum berkenaan dengan pertimbangan kepentingan, penetapan fakta-fakta atau penjelasan peraturan tertulis dalam penggunaan suatu wewenang organ pemerintahan. Perbedaan utama peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan adalah bahwa pembuatan aturan umum peraturan kebijakan ini tanpa kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan secara esensial berkenaan dengan organ pemerintahan dalam hal ini semata-mata menggunakan kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan pemerintahan,

⁵⁹ Ridwan HR, *Ibid*, h. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan pemerintahan itu tidak terikat secara tegas dan ketentuan umum digunakan pada pelaksanaan kewenangan.⁶⁰

Peraturan kebijakan tidak didasarkan pada peraturan formal yang memberikan kewenangan, dengan kata lain tidak dapat ditemukan dasar peraturan dalam Undang-Undang. Peraturan tidak tertulis, dihasilkan oleh serangkaian keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah saat mereka menjalankan otorisasi pemerintah kepada warga negara, atau ditentukan secara tertulis oleh lembaga pemerintah. Undang-Undang memberikan pedoman umum, dengan kata lain, tidak ada warga negara yang membuat pernyataan tentang bagaimana lembaga pemerintah dapat menjalankan kewenangan pemerintahan bebas mereka untuk setiap warga negara dalam keadaan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Ciri-ciri dari peraturan kebijakan sebagai berikut⁶¹ :

- 1) Peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-undangan;
- 2) Prinsip pembatasan dan *review* peraturan perundang-undangan tidak dapat diimplementasikan dalam peraturan kebijakan;
- 3) Peraturan tersebut tidak dapat diuji sepenuhnya karena tidak ada dasar hukum untuk mengambil keputusan tentang peraturan tersebut;
- 4) Peraturan Kebijakan didasarkan pada situasi kurangnya badan administratif untuk merumuskan peraturan;
- 5) Pengujian peraturan kebijakan tidak hanya terbatas pada pemerintah, jadi yang terpenting adalah prinsip umum *good governance*.

⁶⁰ Ridwan HR, *Ibid.*, h 174-177.

⁶¹ Ridwan HR, *Ibid.*, h 177-182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 6) Format diberikan dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yaitu keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, bahkan dapat ditemukan dalam bentuk peraturan.

Salah satu instrumen yuridis pemerintah dalam penyelenggaraan negara adalah peraturan kebijakan (*beleidsregels*). Pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah *policy* atau *beleid*, merupakan keputusan yang menggariskan cara yang efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Istilah peraturan kebijakan bersumber dari istilah yang dikembangkan dalam hukum administrasi yang disebut istilah *beleids regels bestuurregel* atau *beleidslijnen* (perundang-undangan semu). Untuk memahami secara mendalam tentang sejarah perkembangan dari konsep peraturan kebijakan (*beleidsregels*), maka perlu pula dipahami konsep peraturan kebijakan tersebut dari sisi penggunaan atau pemakaian sebagai salah satu sarana (instrumen) pemerintah dalam tugasnya sebagai penyelenggara Negara. Tujuan utama pembentukan dan penetapan peraturan kebijakan adalah untuk memberikan arahan kepada pejabat dibawah pemerintahan agar lancar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya.⁶²

⁶² Putu Eka Pitriyantini, "Peraturan Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Komunikasi Hukum (Bali, 2019), Vol. 5, No.2, h. 79-80.

4. Kedudukan Peraturan Kebijakan Terhadap Peraturan Hukum

Peraturan kebijakan merupakan hasil dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (*diskresi*) dalam mengambil keputusan setiap situasi yang dihadapi. Hukum positif di Indonesia, peraturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan kebijakan.⁶³ Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dari diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan adanya kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁴

Pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan harus mempertimbangkan definisi, ruang lingkup, persyaratan, prosedur, dan konsekuensi hukum dari kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun jika melihat definisi diskresi dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tidak memuat isi kebijakan dan regulasi, untuk menegakkan kepastian hukum dan memperkuat kebijakan dan regulasi (surat edaran) dalam hukum positif Indonesia, perlu mengubah Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk menambah muatan kebijakan dan peraturan.

Ruang lingkup diskresi dalam Undang-Undang Administrasi pemerintahan hanya keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang

⁶³ Sadhu Bagas Suratno, “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, e-Journal Lentera Hukum (Jember, 2017), Vol. 4, No.3, h. 167.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak dari kekosongan hukum atau tidak adanya regulasi yang mengatur terhadap pembentukan peraturan kebijakan. Pejabat pemerintahan mengambil keputusan tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada peraturannya tidak ada, oleh karena itu pejabat pemerintahan diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan asas yuridiktas dan legalitas. Pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan harus mempertimbangkan definisi, ruang lingkup, persyaratan, prosedur, dan konsekuensi hukum dari kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun jika melihat definisi diskresi dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tidak memuat isi kebijakan dan regulasi, guna menegakkan kepastian hukum dan memperkuat kebijakan dan regulasi (surat edaran) dalam hukum positif Indonesia, perlu mengubah Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk menambah muatan kebijakan dan peraturan.⁶⁵

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Urutan dari peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dari urutan peraturan perundang-undangan tidak ada surat edaran secara jelas, dikarenakan untuk surat edaran sendiri tidak termasuk kedalam peraturan perundang-

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi Ekonomi*”, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 33-35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, surat edaran termasuk kedalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang secara materil mengikat umum dan sebagai perangkat administratif untuk memberikan petunjuk mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

5. Keputusan-Keputusan Yang Bersifat Mengatur

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan keputusan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁷ Keputusan-keputusan mengikat secara umum bersifat mengatur (*regeling*) sedangkan keputusan-keputusan konkret atau individual bersifat keputusan administratif atau ketetapan (*beschikking*).

Keputusan atau ketetapan merupakan peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final terhadap suatu tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat mengatur. Perbuatan atau

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

tindakan hukum memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan yang berlaku mengikat setiap orang.

Keputusan yang bersifat mengatur (*regels*) terdapat pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang berbunyi :

“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini”

Menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, setiap keputusan-keputusan yang berlaku diartikan sebagai peraturan yang bersifat mengatur sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini.

6. Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur *arbitrase* dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.⁶⁸

Hukum adalah sarana yang terkandung nilai-nilai yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, memutuskan memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal. Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Penegakan hukum tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu⁶⁹ :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit*, h. 313.

⁶⁹ Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 291-293.

Hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara lain dengan empat faktor, yakni⁷⁰ :

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- b. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum yaitu⁷¹ :

- a. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
- b. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.
- c. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan.

⁷⁰ Ridwan HR, *Ibid*, h. 293.

⁷¹ Ridwan HR, *Ibid*, h. 293-295.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas dalam penegakan (hukum).

Faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural dan ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat ditolak satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya. Oleh karena itu dalam pembuatan Undang-Undang harus memperhatikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis Faktor Struktural sangat ditentukan oleh aparat penegak hukumnya, yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, usaha mempertahankan hukum dan apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang dapat memaksakan berlakunya hukum. Faktor Kultural Masyarakat adanya kesadaran hukum anggota masyarakat untuk menghindari perbuatan yang dilarang, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan mengerti akibat-akibat hukumnya jika melanggar hukum.⁷²

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Dalam rangka peningkatan upaya pelaksanaan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat

⁷² Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", Jurnal Wawasan, (Bandung: 2013), Vol.29, No.2, h. 851-852.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

maupun aparat penegak hukum itu sendiri, maka pemerintah Negara Republik Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap beberapa peraturan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada demi tercapainya masyarakat yang adil dan tentram, dengan adanya perbaikan peraturan bagi para aparat penegak hukum maka masing-masing pihak diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab, pelaksanaan tersebut tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat.⁷³

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup bermasyarakat.⁷⁴

7. Sanksi-Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat *reparatoir-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha

⁷³ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, (Purwokerto: 2008), Vol.8, No.3, h. 200-203.

⁷⁴ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, (Sukabumi: 2017), Vol.VII, No.1, h. 24-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Negara tanpa melalui peradilan. Jenis-jenis sanksi administrasi dilihat dari segi sasarannya :

- a. Sanksi *reparatoir* artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*);
- b. Sanksi *punitif* artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c. Sanksi *regresif* adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.⁷⁵

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap berbagai sanksi penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara, karena di dalamnya menyangkut bukan saja tentang efektivitas penegakan hukum, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi, dan prosedur penerapan sanksi, tetapi juga untuk mengukur apakah norma-norma Hukum Administrasi Negara yang di dalamnya memuat sanksi telah sesuai dibuat dan relevan diterapkan di tengah masyarakat, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam, yaitu :

- a. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*);

⁷⁵ Iwan Fauzani Raharja, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", Inovatif, (2014), Vol.VII, No.II, h. 125-126.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kewenangan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang bevoegheid*) dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma Hukum Administrasi Negara, kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Paksaan pemerintahan dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantara hakim (*parate executie*) dan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar. Kewenangan pemerintah untuk menggunakan *bestuursdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrije bevoegdheid*) dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangan inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya. Kebebasan pemerintah untuk menggunakan wewenang paksaan pemerintahan ini dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeen beginselen van behoorlijk bestuur*), seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial, penerapan sanksi apalagi berupa paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan hukum yang baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeen beginselen van behoorlijk bestuur*). Salah satu ketentuan hukum yang ada ialah bahwa pelaksanaan *bestuursdwang*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau paksaan pemerintahan itu wajib didahului dengan surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata usaha Negara (KTUN).⁷⁶

- b. Penarikan Kembali Keputusan Yang Menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya);

Keputusan yang memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada. Salah satu sanksi dalam Hukum Administrasi Negara adalah pencabutan atau penarikan Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan baru yang isinya menarik kembali atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan yang terdahulu. Dengan kata lain, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul setelah terbitnya keputusan tersebut menjadi hapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya keputusan itu, dan sanksi ini dilakukan sebagai reaksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig gedrag*). Penarikan kembali keputusan ini menimbulkan persoalan yuridis, hal ini karena di dalam HAN terdapat asas setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum, oleh karena itu KTUN yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh Hakim di pengadilan. Di samping itu, dapat pula pencabutan keputusan itu dilakukan karena kesalahan dari pihak pembuat keputusan atau pemerintah, artinya keputusan yang dikeluarkan itu ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya dan diketahui dengan jelas, maka keputusan itu

⁷⁶ Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 304-310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan Hukum Administrasi Negara, baik tertulis maupun berupa asas-asas hukum. Keadaan ini tidak boleh ditiadakan, bila mana menarik kembali keputusan yang bersangkutan membawa kepada yang dikenainya suatu kerugian yang sangat lebih besar daripada kerugian karena keadaan yang tidak layak tersebut.⁷⁷

c. Pengenaan Uang Paksa Oleh Pemerintah (*dwangsom*);⁷⁸

Dalam Hukum Administrasi Negara, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan. Organ pemerintahan menetapkan uang paksa itu apakah sekali bayar ataupun dicicil berdasarkan waktu (tertentu) ketika perintah itu tidak dijalankan atau membayar sejumlah uang ketika pelanggaran itu terjadi. Jumlah uang yang dibayar sesuai dengan beratnya kepentingan yang dilanggar dan (sesuai) dengan tujuan diterapkannya penetapan uang paksa itu. "Dalam keputusan untuk penetapan uang paksa yang tujuannya menghilangkan atau mengakhiri pelanggaran, kepada pelanggar diberikan jangka waktu untuk melaksanakan perintah tersebut (dengan) tanpa penyitaan uang paksa.

d. Pengenaan Denda Administratif;

Denda administratif (*bestuurslijke boetes*) berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekadar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti,

⁷⁷ Ridwan HR, *Ibid*, h. 310-314.

⁷⁸ Ridwan HR, *Ibid*, h.315-316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda (*geldboete*) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian. umumnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukum yang berupa denda ini telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan.⁷⁹

6. Asas-Asas Umum Pemerintahan Daerah Yang Baik

Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (*central government*), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan negara dipencarkan maka terjadi desentralisasi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang berkembang dalam ruang lingkup administrasi negara, berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat dalam menjalankan tugas. Kaidah hukum dalam asas ini termasuk kedalam berbagai peraturan hukum positif.⁸⁰

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, banyak pertimbangan yang dijadikan sebagai pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan dengan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*the good local*

⁷⁹ Ridwan HR, *Ibid*, h. 316-318.

⁸⁰ Ridwan HR, *Ibid*, h. 235.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

governance). Badan atau pejabat pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan pemerintahan dapat diamati dari prosedur dan substansi pemberian wewenang. Dasar kewenangan pemerintahan daerah mengeluarkan peraturan kebijakan bersumber dari kebebasan bertindak (*Freies Ermessen*) yang dimiliki oleh administrasi negara.⁸¹

Asas-asas pemerintahan yang baik, pemerintahan mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.⁸² Penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

C. Hukum Perhubungan Transportasi

1. Pengertian Hukum Perhubungan dan Transportasi

Hukum perhubungan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang segala aspek perhubungan. Peraturan hukum tersebut meliputi pula asas hukum, norma hukum, teori hukum, serta praktik hukum perhubungan. Asas hukum perhubungan merupakan landasan filosofis sebagai dasar ketentuan-

⁸¹ Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", Jurnal Hukum dan Pembangunan (Cianjur: 2018), Vol.48, No.4, h. 887-888.

⁸² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan perhubungan yang menyatakan kebenaran, keadilan, serta kepatutan. Kebenaran, keadilan, serta kepatutan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak. Hukum perhubungan berperan mengatur dan menjadi pedoman perilaku ataupun perbuatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perhubungan, pengaturan ini memusatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perhubungan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu sampai di tempat tujuan dengan selamat, aman, bermanfaat, nilai guna meningkat, serta menguntungkan seluruh pihak.⁸³

Teori hukum perhubungan menggambarkan kajian pengembangan hukum perhubungan yang bertujuan untuk mendapatkan faedah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Teori hukum perhubungan adalah serangkaian ketentuan Undang-Undang atau perjanjian mengenai perhubungan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan perhubungan. Teori hukum perhubungan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan Undang-Undang atau perjanjian bagaimana seharusnya para pihak berbuat sehingga tujuan perhubungan itu tercapai. Praktik hukum perhubungan merupakan perbuatan nyata yang masih berlangsung atau perbuatan yang sudah selesai dilakukan, seperti keputusan hakim atau yurisprudensi (*judge made law*), dokumen hukum (*legal documents*), seperti karcis penumpang dan surat muatan barang.⁸⁴

⁸³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Pengangkutan Niaga*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 7-8

⁸⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, h. 8.

2. Dasar Hukum Perhubungan Transportasi

Dasar hukum Transportasi terbagi atas 3 sesuai dengan bidang-bidang perhubungan transportasi, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 5 yang berbunyi Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.⁸⁵
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dijelaskan Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.⁸⁶
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dijelaskan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.⁸⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/348 Tahun 2019 tentang Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dasar hukum terbitnya keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

3. Transportasi *Online* Di Indonesia

Awal berdirinya transportasi *online* pertama kali di Indonesia adalah Gojek, yang menghadirkan aplikasi ojek *online* sebelum pesaing muncul. Pada tahun 2011 Gojek sudah mulai dirintis, namun perkembangan teknologi baru ada terhadap pengembangan aplikasi pada tahun 2015. Sehingga resminya Gojek di Indonesia bulan Desember tahun 2015.

Perkembangan teknologi akan berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia akan teknologi. Berbagai inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia serta memberikan banyak kemudahan dalam melakukan aktifitas manusia. Kecanggihan teknologi hadir di setiap sudut kehidupan manusia, termasuk dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah membuat beberapa perusahaan mengembangkan kemajuan bidang teknologi. Kemunculan dari perusahaan ini menjadi sebuah inovasi bisnis yang salah satu perkembangan teknologi saat ini terdapat pada jasa layanan ojek *online* atau transportasi ojek *online*.

Di akhir tahun 2014, walaupun *Uber* dan *Grab taxi* telah masuk ke pasar Indonesia, hampir tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bila layanan ojek *online* akan menjadi sesuatu yang besar pada tahun ini. Setahun berselang, berkat kehadiran aplikasi Gojek pada bulan Januari ojek *online* langsung menjadi salah satu bisnis *startup* yang paling populer di Indonesia. Dalam rentang waktu dua belas bulan, Gojek berkembang dari sebuah aplikasi mobile baru menjadi sebuah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan besar, yang kemudian diikuti oleh perusahaan *Grab Taxi* dengan layanan *Grab Bike*.⁸⁸

Perkembangan dan kemajuan dari perusahaan Gojek membuat induk perusahaan membuka cabang 167 Kota dan Kabupaten di Indonesia, termasuk Kota Bukittinggi. Di Kota Bukittinggi Gojek berdiri pada bulan Agustus tahun 2017. Kehadiran cabang ini diharapkan dapat membantu dalam memperlancar penggunaan semua layanan Gojek di Kota Bukittinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁸ Aziah. Adawia, "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)", *Cakrawala Jurnal Humaniora*, (Bandung-Tangerang: 2017), Vol.18, No.2, h. 152.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tentang pelaksanaan tarif tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, pemerintah daerah Kota Bukittinggi sedang mengoptimalkan adanya peraturan daerah tentang ojek online ini. Peraturan kebijakan ini bertujuan agar Dinas Perhubungan dapat mengawasi dalam segala aspek yang berlaku dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Uji coba yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengawasan pelaksanaan tarif di Kota Bukittinggi masih dalam pengembangan dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bukittinggi selaku pembentuk Peraturan Daerah bersama Walikota.
2. Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tarif sekarang ini Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 16 ayat 2 bagian 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat telah menegaskan Perlindungan hukum yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran tarif ada 2 macam yaitu dengan perlindungan hukum dalam bentuk mencegah (*preventif*) dan perlindungan hukum penyelesaian (*represif*) dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terhadap pelanggaran pelaksanaan tarif Gojek yaitu sanksi paksaan pemerintah melalui surat resmi dan sanksi denda administratif.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis menyampaikan saran yang penulis anggap perlu dalam penelitian ini, penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam kebijakan pelaksanaan peraturan tarif Gojek berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum yang merugikan orang banyak, harus merealisasikan dan membahas bersama pemerintah daerah dan DPRD secepat mungkin, sehingga tercapai kepastian hukum dan keadilan substantif demi tercapainya keadilan.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah harus menindak secara tegas dalam segala pelanggaran yang merugikan orang banyak. Penerapan sanksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan agar tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat tentang penerapan tarif Gojek di Kota Bukittinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Andriansyah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, (Jakarta Pusat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015)
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2004)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005)
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2017)
- Edison Piliang, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Di Minangkabau*, (Sumatera Barat, Bukittinggi, Kristal Multimedia, 2014)
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Kencana, 2019)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010)
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013)
- Muhamad Rahkmat, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung, LoGoz Publishing, 2014)
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2015)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Depok, Rajawali Pers, 2018)

Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2012)

Suratmo, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2014)

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015)

Undang-undang ,

Badan Pusat Statistik, Kota Bukittinggi Dalam Angka, (2019)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bukittinggi, (2019)

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956

Skripsi ,

Ibrahim Rambe, *Skripsi, Dampak Keberadaan Transportasi Online (Go-Jek) Terhadap Tukang Becak Bermotor*, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2018)



Asep Suparman, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Wawasan, (Bandung, 2013)

Aziah. Adawia, *Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)*, Cakrawala Jurnal Humaniora, (Bandung-Tangerang, 2017)

Bahder Johan Nasution, *Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Ilmu Hukum, Demokrasi*, (2007)

Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal Tapis, (2015)

I Wayan Suandi, *Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Bali, 2017)

Iwan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif, (2014)

M. Husein Maruahey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, (Sukabumi, 2017)

Mario Julyano. Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido (Diponegoro, 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pratama, Suradi dan Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro Law Journal, (Semarang, 2016)
- Putu Eka Pitriyanti, *Peraturan Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Komunikasi Hukum (Bali, 2019)
- Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum dan Pembangunan (Cianjur, 2018)
- Riri Nazriyah, *Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, (2002)
- Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, e-Journal Lentera Hukum (Jember, 2017)
- Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, (Purwokerto, 2008)
- Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial review), Jurnal Legislasi Indonesia, (Jakarta Selatan, 2016)

Tumuwe. Damis. Mulianti, *Pengguna Ojek Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado*, Holistik, (Manado, Januari-Juni 2018)

Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia , Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, (Jakarta Pusat, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah Bapak Mengetahui Sebelumnya Pelanggaran Yang Terjadi Terhadap Tarif Ojek Online Di Kota Bukittinggi?
2. Dari Mana Sumber Bapak Mengetahui Adanya Pelanggaran Tarif Tersebut?
3. Apakah Banyak Keluhan Yang Di Adukan Oleh Para Driver Kepada Dinas Perhubungan?
4. Bagaimana Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Terhadap Tarif Transportasi Ojek Online Di Kota Bukittinggi?
5. Apakah Ada Sanksi Yang Diterapkan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Tarif Ojek Online?
6. Kebijakan Yang Dilakukan Apakah Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Sendiri Atau Bersama Pemerintah Daerah?
7. Sepengetahuan Bapak Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pelanggaran Yang Terjadi Di Kota Bukittinggi?



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, "Pelaksanaan Kebijakan Tarif Transportasi Ojek Online Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Di Kotamadya Bukittinggi" yang ditulis oleh :

Nama : Brama Yudha Andika
NIM : 11527103139
Program Studi: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/ Tanggal : Senin, 19 April 2021
Waktu : 08:30
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Syahpawi, M, Sh

Sekretaris
Iham Akbar, SH. MH

Penguji 1
Dr. Muhammad Darwis, SH. MH

Penguji 2
Dr. H. Abu Samah, MH

Mengetahui,
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN TARIF TRANSPORTASI OJEK ONLINE BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI DI KOTAMADYA BUKITTINGGI, ditulis oleh saudara :

Nama : BRAMA YUDHA ANDIKA
NIM : 11527103139
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 13 Desember 2019
Narasumber : LYSA ANGRAYNI, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2019

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan
dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

JALINUS, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

LYSA ANGRAYNI, SH., MH
NIP. 19790131 200604 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Penelitian yang tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 01 April 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2697/2020

Sifat : Biasa

Jumlah (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: BRAMA YUDHA ANDIKA
NIM	: 11527103139
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 : PELAKSANAAN TARIF TRANSPORTASI OJEK ONLINE BERDASARKAN
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 348
 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN
 SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
 YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI DI KOTAMADYA BUKITTINGGI

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 11005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 c. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 d. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 e. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 f. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 g. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 h. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 i. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 j. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 k. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 l. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 m. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 n. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 o. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 p. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 q. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 r. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 s. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 t. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 u. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 v. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 w. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 x. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 y. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 z. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

SURAT KETERANGAN

Nomor 551/341/DISHUBBKT/VI-2020

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Brama Yudha Andhika**
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 11527103139
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dengan judul Skripsi Pelaksanaan Tarif Transportasi Ojek Online Berdasarkan KM Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi di Kota Bukittinggi.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

An.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI

Sekretaris



Drs. SOSIAWAN PUTRA

NIP.196804221998031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang-Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/32381
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2697/2020 Tanggal 1 April 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Brama Yudha Andika |
| 2. NIM / KTP | : 1375012706960001 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JL. TAMAN KARYA WARUNG FAREL |
| 6. Judul Penelitian | : Pelaksanaan Tarif Transportasi Ojek Online Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi di Kotamadya Bukittinggi |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 April 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/453/KKPol-KB/VI-2020

Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- a. Bahwa sesuai surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503 / DPMPTSP / NON IZIN – RISET / 32381 Tanggal 2 April 2020 Perihal Rekomendasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **BRAMA YUDHA ANDIKA**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 17 Juni 1996
 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
 Alamat : Jl. Kinantan RT 006 RW 001 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat
 Nomor Identitas : 1375012706960001
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Tarif Transportasi Ojek Online Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi di Kota Bukittinggi.
 Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
 Waktu Penelitian : 16 Juni s/d 16 Agustus 2020
 Anggota Penelitian : -
 Digunakan Untuk : Penelitian Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Pelaksanaan penelitian dengan **Protokol Kesehatan Covid-19** dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian.
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

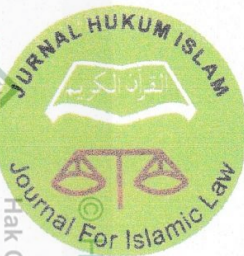
Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 16 Juni 2020

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA BUKITTINGGI
 Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S.Sos
 NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : BRAMA YUDHA ANDIKA
NIM : 11527103139
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN KEBIJAKAN TARIF TRANSPORTASI OJEK ONLINE BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI DI KOTAMADYA BUKITTINGGI

PEMBIMBING: NUR HIDAYAT, S.H.,M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

A. Pimpinan Redaksi



DR. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang